

SURVAI "KOMPAS" TENTANG KELAS MENENGAH JAKARTA

Antara Stabilitas dan Demokrasi

PENGANTAR REDAKSI

PROYEK penelitian besar tentang kelas menengah dicanangkan oleh beberapa pakar ilmu sosial dari Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taiwan. Penelitian yang disebut Proyek SEAMC (Southeast Asian Middle Classes) itu sudah dirintis sejak tahun 1989.

Pada tahap pertama (1992-1993), Proyek SEAMC dilaksanakan di empat negara industri baru Asia Timur: Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura; yang hasil-hasilnya telah mereka diskusikan pada 1994. Tahap kedua (1995-1996), di lima negara Asia Tenggara: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Di Indonesia, proyek tersebut dilakukan Litbang Kompas.

Kelahiran kelas menengah di Indonesia secara mencolok merupakan dampak kemajuan pembangunan ekonomi. Namun benarkah kelas menengah Indonesia tidak bisa diharapkan menjadi agen perubahan? Benarkah mereka justru ingin mempertahankan status quo karena merasa diuntungkan oleh situasi sekarang? Pembaca dapat memahami persoalan ini melalui laporan yang ditulis oleh Staf Litbang Kompas, Farida A. Sondakh, Y. Anung Wendyartoko, dan Nikensari Setiadi dalam empat tulisan di bawah ini.

Satu dimuat di halaman UTAMA, tiga di halaman OPINI.

KONSERVATIF dan ragu terhadap proses demokratisasi, itulah sikap kelas menengah Jakarta. Sikap seperti ini agaknya berbeda dengan citra kelas menengah yang selama ini dikenal, yaitu kelas pembaharu dan ujung tombak demokrasi.

Tetapi, sikap yang cenderung konservatif, pro-kemampuan, dan menganggap masyarakatnya belum siap menerapkan demokrasi, sebenarnya juga gambaran kelas menengah di Asia Timur, seperti yang ditunjukkan dalam hasil penelitian tentang kelas menengah di Asia Timur.

Konservatisme mereka paling tidak terlihat dari sikap terhadap penyebab kemiskinan. Bagi sebagian besar kelas menengah Jakarta, penyebab kemiskinan bukanlah kesalahan kebijakan pemerintah (58 persen). Kemiskinan ada karena harus ada masyarakat atas dan masyarakat bawah (62 persen).

Di antara kelas menengah sendiri, KMM (kelas menengah marjinal) yang paling banyak berpendapat bahwa penyebab kemiskinan bukanlah kesalahan pemerintah (65 persen). Menurut mereka, kemiskinan hadir karena memang harus ada masyarakat atas dan bawah (66 persen). Jadi, dibandingkan dengan KML (kelas menengah lama) dan KMB (kelas menengah baru), KMM yang paling konservatif.

Kelas menengah pada umumnya setuju bahwa masyarakat belum siap menerapkan demokrasi yang sesungguhnya (41 persen), setuju bahwa setiap organisasi politik yang mengancam stabilitas nasional seharusnya diberangus (68 persen), setuju dengan pendapat bahwa pemerintah mengetahui apa yang terbaik bagi negara dan masyarakat (73 persen). Mereka menganggap belum terciptanya sistem politik yang demokratis sebagai suatu hal yang kalah serius dibandingkan tingginya kriminalitas (hanya 49 persen yang menganggap hal itu serius), pengangguran (87 persen), serta inflasi (85 persen). Mereka juga menilai bahwa diri mereka sebagai kelas yang lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi daripada kebebasan politik.

Di pihak lain, mereka setuju bahwa pemerintah harus lebih mendengarkan suara rakyat (93 persen), memberi kebebasan kepada pers (80 persen), serta pemerintah sebaiknya tidak

membungkam pendapat kritis yang berbeda dengan pendapat pemerintah (54 persen).

Keraguan dan kebingungan mereka terhadap proses demokratisasi agaknya berhubungan dengan ketidakmandirian mereka. Sebagai pengusaha, profesional, dan pekerja yang hidup matinya banyak bergantung pada pesatnya pertumbuhan ekonomi yang distribusinya diatur oleh negara, mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi memang akan cenderung dijaga walau mereka juga ingin perubahan.

Sikap kelas menengah yang lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi daripada politik serta cenderung ingin mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi juga terlihat dari apa yang mereka anggap sebagai paling penting 10 tahun mendatang. Bagi mereka, mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi (32 persen) serta mempertahankan stabilitas ekonomi (18 persen) adalah hal yang dianggap paling penting untuk 10 tahun mendatang.

Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sangat bergantung pada stabilitas politik. Oleh sebab itu kebutuhan untuk memastikan negara memiliki pertahanan yang kuat (11 persen) adalah sasaran yang dianggap terpenting berikutnya. Sedangkan mengembangkan masyarakat yang lebih menghargai gagasan daripada uang (1 persen), melindungi kebebasan berbicara (1 persen), mengupayakan rakyat agar lebih berani bersuara (5 persen), yang ketiganya merupakan unsur penting dalam demokrasi, dianggap sebagai bukan sasaran terpenting yang harus dicapai dalam 10 tahun mendatang (lihat Tabel).

Walaupun sikap kelas menengah terhadap demokrasi cenderung mendua, dibandingkan dengan kelas bawah mereka terlihat lebih pro-demokrasi. Bagi kelas menengah baru dan kelas menengah marjinal, demokrasi tetap penting walaupun pemerintah dapat melakukan yang terbaik dalam bidang keamanan, transportasi, penanganan ekonomi yang sehat, dan efisiensi (KMB 59 persen, KMM 49 persen).

Partisipasi politik

Partisipasi kelas menengah dalam politik pemilu yang merupakan wujud paling jelas kehidupan demokrasi dan kehidupan politik agaknya merupakan bukti bahwa kelas menengah, dan juga kelas bawah, enggan berurusan dengan segala sesuatu yang berbau politik. Partisipasi politik pemilihan umum mereka sangat rendah, baik itu keikutsertaan dalam pawai kampanye salah satu OPP (21 persen), hadir dalam kampanye (24 persen), penyebaran selebaran OPP (24 persen), menyumbang dana ke salah satu OPP (3 persen), maupun dalam upaya mempengaruhi teman untuk memilih OPP tertentu (4 persen).

Dalam gerakan-gerakan sosial yang merupakan salah satu unsur demokrasi, terlihat bahwa kelas menengah maupun kelas bawah sangat minim partisipasinya meskipun mayoritas dari mereka mendukung gerakan-gerakan sosial. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial seperti perlindungan konsumen, gerakan pekerja, gerakan kaum perempuan, gerakan pro demokrasi, maupun perlindungan HAM, hanya di bawah 10 persen. Satu-satunya gerakan sosial yang keikutsertaan kelas menengahnya di atas 10 persen adalah gerakan perlindungan lingkungan.

Khusus mengenai gerakan pekerja, walaupun kelas menengah baru dan kelas menengah marjinal pada dasarnya sama seperti buruh, yaitu sama-sama dibayar atas pekerjaannya, ternyata sikap mereka bila terjadi pemogokan buruh tidaklah sama. Dalam situasi buruh mogok menuntut kondisi kerja dan upah yang lebih baik, sebagian besar kelas bawah (buruh) berharap bahwa buruh akan memperoleh beberapa tuntutan penting dari yang dituntutnya (42 persen). Namun mayoritas kelas menengah (KMB 56 persen dan KMM 48 persen) tidak mengambil sikap berpihak pada kepentingan buruh, tidak pula menentanginya, tetapi tergantung kondisi.

Sebagian besar mereka mengatakan bahwa para pekerja profesional akan berusaha netral dan tidak ikut campur dalam konflik (KMB 55 persen, KMM 44 persen). Walaupun demikian sebagian besar mereka mengatakan tidak setuju bila buruh yang melakukan pemogokan dipecat.

Citra diri

Entah bagaimana, walaupun sikap mereka seperti yang digambarkan di atas, kelas menengah Jakarta cenderung menilai diri mereka berperan sebagai ujung tombak demokrasi (54 persen) dan telah memberikan sumbangan sangat berarti bagi pengembangan masyarakat (71 persen). Walaupun demikian, seperti disebutkan di atas, mereka cenderung menilai bahwa kelas menengah lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi daripada kebebasan politik (62 persen). Dari penilaian diri tersebut, tampaknya memang kelas menengah enggan untuk berurusan dengan politik.

Dari sikap mereka yang konservatif, lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, enggan berurusan dengan politik, menganggap sistem politik yang demokratis serta usaha menciptakan masyarakat yang demokratis bukan hal yang terlalu penting, maka pandangan tentang kelas menengah Indonesia, dan kelas menengah Asia pada umumnya akan berubah. Harapan bahwa kelas menengah menjadi ujung tombak demokrasi dan pembaharu menjadi terlalu besar.

Mungkin mereka hanyalah sekelompok individu yang sebenarnya punya perhatian pada masalah sosial tetapi lebih mementingkan gaya hidup materialis. Mereka sendiri percaya bahwa mereka telah banyak berperan dalam masyarakat, tetapi pada dasarnya tanpa disadari oleh dirinya sendiri mereka kurang peduli pada gagasan-gagasan besar seperti demokrasi. ***

Tabel : Sasaran Terpenting Menurut Kelas Menengah dan Bawah

Kelas						
Menengah						
Keseluruhan Kelas Menengah Kelas						
Lama Baru Marjinal Bawah Total						
No Sasaran (%) (%) (%) (%) (%) (%)						
1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi	31,8	34,0	31,5	29,7	34,0	32,0
2. Mempertahankan stabilitas ekonomi	18,4	16,5	20,2	17,8	12,6	17,8
3. Memastikan bahwa negara memiliki pertahanan yang kuat	11,4	10,6	12,0	11,6	10,7	11,4
4. Menekan melambungnya harga-harga	9,5	11,2	7,4	10,5	11,7	9,7
5. Menjaga ketertiban bangsa	6,4	7,3	5,1	7,2	6,8	6,4
6. Memberi tempat lebih banyak bagi suara rakyat dalam penyusunan keputusan penting pemerintah	5,4	3,6	7,2	4,7	4,9	5,3
7. Mengembangkan masyarakat yang lebih manusiawi	5,2	5,6	5,1	4,7	3,9	5,0
8. Mengupayakan agar rakyat lebih berani bersuara	4,5	3,0	4,1	6,9	3,9	4,5
9. Memerangi segala bentuk kejahatan	4,3	4,6	4,6	2,9	5,8	4,3
10. Melindungi kebebasan berbicara	1,3	1,0	1,3	1,8	1,0	1,3
11. Lain-lain	2,0	2,7	1,6	2,2	4,9	2,3
Jumlah Responden (n)	970	303	391	276	103	1073

(Sumber: Litbang Kompas1996)